

Analisis Kualitas Data Sektoral dalam Mendukung Satu Data Sumsel di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

Muhamad Humam Alchak

Sistem Informasi, Saintek, UIN Raden Fatah, Palembang, Indonesia

*Email Korespondensi: humam0518@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 26-08-2026
Disetujui 01-09-2026
Diterbitkan 03-09-2026

ABSTRACT

Data quality is an important aspect of supporting One Data implementation because government data must have adequate structure, format, metadata, and information to be used and shared. At the regional level, sectoral data preparation still faces problems before publication through the Satu Data Sumsel Portal. This study aims to analyze sectoral data quality, identify data management problems, and examine data improvement processes at the DPMPTSP of South Sumatra Province. The study uses a descriptive approach based on data from the Satu Data Sumsel Impactful Internship Batch 2 in 2026 within the Planning, Evaluation, and Reporting (PEP) Work Team. Data were collected through observation, documentation, and direct involvement in data collection, examination, data cleaning, standardization, metadata validation, dataset input, and quality control. The results show that of 9 priority sectoral data indicators, 7 were processed and 2 remained pending. Problems included merged cells requiring transformation into Flat Table CSV format, regional information standardization, and validation of 15 statistical metadata elements. Seven datasets and their metadata were successfully entered and examined on the CKAN-based Satu Data Sumsel Portal. The findings indicate that sectoral data quality depends on data structure, standardization, metadata, and publication readiness.

Keywords: data quality; sectoral data; Satu Data Sumsel; metadata; DPMPTSP

ABSTRAK

Kualitas data merupakan aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data karena data pemerintah harus memiliki struktur, format, metadata, dan informasi yang memadai agar dapat digunakan dan dibagikan. Pada tingkat daerah, penyiapan data sektoral masih menghadapi permasalahan sebelum dipublikasikan melalui Portal Satu Data Sumsel. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas data sektoral, mengidentifikasi permasalahan pengelolaan data, serta mengkaji proses perbaikan data pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif berdasarkan data dari kegiatan Magang Berdampak Satu Data Sumsel Batch 2 Tahun 2026 pada Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP). Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan keterlibatan langsung dalam pengumpulan, pemeriksaan, *data cleaning*, standarisasi, validasi metadata, input dataset, dan *quality control*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 9 indikator data sektoral prioritas, 7 berhasil diproses dan 2 masih *pending*. Permasalahan meliputi *merged cells* yang perlu ditransformasi menjadi *Flat Table* dalam format CSV, standarisasi informasi wilayah, serta validasi 15 elemen metadata statistik. Sebanyak 7 dataset beserta metadata berhasil diinput dan diperiksa pada Portal Satu Data Sumsel berbasis CKAN. Hasil menunjukkan bahwa kualitas data sektoral dipengaruhi oleh struktur, standarisasi, metadata, dan kesiapan publikasi.

Katakunci: kualitas data; data sektoral; Satu Data Sumsel; metadata; DPMPTSP

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Humam Alchak, M. (2026). Analisis Kualitas Data Sektoral dalam Mendukung Satu Data Sumsel di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(5), 10232-10241. <https://doi.org/10.63822/mn5xz681>

PENDAHULUAN

Data merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Ketersediaan data yang berkualitas menjadi penting agar kebijakan dan pelayanan publik dapat disusun berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam lingkungan pemerintahan, permasalahan data tidak hanya berkaitan dengan ketersediaannya, tetapi juga dengan konsistensi, standarisasi, integrasi, dan kemampuan berbagai instansi untuk mengelola serta membagikan data secara terpadu.

Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai landasan penyelenggaraan tata kelola data pemerintah. Satu Data Indonesia mengatur agar data pemerintah memenuhi prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk. Penerapan prinsip tersebut ditujukan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan (Pemerintah Republik Indonesia, 2019).

Pada tingkat daerah, penerapan prinsip Satu Data Indonesia diwujudkan melalui kebijakan Satu Data Sumsel (SDS). Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (2026) menjelaskan bahwa Satu Data Sumsel merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah daerah yang bertujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Portal Satu Data Sumsel digunakan sebagai sarana integrasi dan penyebarluasan data pemerintah daerah.

Penerapan Satu Data Indonesia pada praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Maulidya dan Rozikin (2022) melalui analisis retrospektif kebijakan Satu Data Indonesia menemukan bahwa hambatan terjadi pada beberapa tahapan penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan data. Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan integrasi data, kapasitas sumber daya manusia, regulasi, dan kesiapan infrastruktur digital.

Permasalahan implementasi Satu Data juga ditemukan pada tingkat pemerintah daerah. Irawan dan Handayani (2025) menganalisis implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Pemerintah Provinsi Banten dan menunjukkan bahwa penerapannya masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia, struktur birokrasi dan prosedur pelaksanaan, serta fasilitas pendukung. Sementara itu, Zannuba et al. (2024) menganalisis implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dan menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pada tingkat daerah melibatkan berbagai unsur kelembagaan dan membutuhkan koordinasi antara organisasi yang terlibat dalam penyelenggaraan data. Selanjutnya, Bernot et al. (2024) mengenai inisiatif Satu Data Indonesia menunjukkan bahwa standarisasi data, interoperabilitas, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan merupakan aspek penting dalam pengembangan tata kelola *open government data*. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa implementasi Satu Data Indonesia masih menghadapi hambatan kebijakan dan administratif dalam proses pengembangan serta pembagian data.

Pada aspek data sektoral, Raja dan Adlan (2022) menunjukkan bahwa penerapan prinsip Satu Data Indonesia menghadapi tantangan teknis karena data sektoral dapat dikelola secara terdesentralisasi oleh masing-masing instansi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kebutuhan standarisasi dan koordinasi antarinstansi menjadi lebih kompleks. Penelitian tersebut menempatkan metadata, standar data, kode referensi, dan interoperabilitas sebagai prinsip penting dalam penerapan Satu Data Indonesia dan mengembangkan konsep *Satu Data Metadata Framework* untuk mendukung pengelolaan data sektoral.

Selain tata kelola dan integrasi, kualitas data menjadi aspek penting dalam pengelolaan data pemerintah. Cahyaningsih et al. (2025) menunjukkan bahwa pengukuran kualitas data diperlukan karena data yang berkualitas menjadi dasar dalam menghasilkan informasi dan rekomendasi yang mendukung pengambilan keputusan. Penelitian tersebut menggunakan *Total Data Quality Management* untuk mengidentifikasi kualitas data pada lingkungan pemerintahan. Berbeda dengan penelitian tersebut yang menggunakan suatu *framework* untuk melakukan pengukuran kualitas data, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kondisi data berdasarkan permasalahan yang ditemukan secara langsung selama proses pengelolaan dan penyiapan data sektoral.

Penelitian yang lebih baru juga menunjukkan bahwa kualitas metadata merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Satu Data di tingkat daerah. Danu (2025) menjelaskan bahwa kualitas metadata statistik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di daerah. Permasalahan metadata dapat berkaitan dengan belum bakunya metadata, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya pengelolaan data. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan data sektoral tidak cukup hanya dengan menyediakan dataset, tetapi juga membutuhkan informasi metadata yang memadai agar data dapat dipahami dan dimanfaatkan secara tepat.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, sebagian penelitian mengenai Satu Data Indonesia lebih banyak membahas implementasi kebijakan, aspek kelembagaan, koordinasi, integrasi, dan tata kelola data. Sementara itu, penelitian mengenai kualitas data lebih banyak menggunakan *framework* atau indikator tertentu untuk melakukan pengukuran kualitas data. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian tersebut karena berfokus pada kondisi kualitas data sektoral pada tingkat perangkat daerah dan proses penyiapannya sebelum dipublikasikan melalui Portal Satu Data Sumsel. Analisis diarahkan pada kondisi ketersediaan data, kesesuaian struktur dan format, konsistensi informasi, kelengkapan metadata, serta kesiapan data untuk dipublikasikan.

Dalam konteks tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu perangkat daerah yang memiliki data sektoral sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada pelaksanaan Magang Berdampak Satu Data Sumsel Batch 2 Tahun 2026, penulis terlibat secara langsung pada Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) dalam proses pengelolaan data sektoral. Kegiatan tersebut meliputi pengumpulan data, pemeriksaan, *data cleaning*, penyesuaian struktur data, standarisasi, penyusunan dan validasi metadata, input dataset ke Portal Satu Data Sumsel berbasis CKAN, serta *quality control*.

Berdasarkan hasil kegiatan, terdapat 9 indikator data sektoral prioritas yang menjadi target pengelolaan. Sebanyak 7 indikator berhasil dikumpulkan dan diproses, sedangkan 2 indikator masih berstatus *pending*. Pada pemeriksaan awal juga ditemukan data dengan struktur tabel yang belum sesuai untuk pengolahan lebih lanjut, sehingga dilakukan *data cleaning* dan transformasi menjadi *Flat Table* dalam format CSV. Selain itu, dilakukan standarisasi informasi wilayah dan penyusunan serta validasi 15 elemen metadata statistik untuk dataset yang tersedia.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan data sektoral dalam mendukung Satu Data Sumsel tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dataset, tetapi juga oleh kesesuaian struktur dan format, konsistensi, kelengkapan metadata, dan kesiapan data untuk diproses serta dipublikasikan. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap kondisi kualitas data sektoral pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan untuk mengetahui permasalahan yang ditemukan dan proses perbaikan yang dilakukan dalam penyiapan data.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kondisi kualitas data sektoral dan permasalahan yang ditemukan dalam proses pengelolaan data pada DPMPTSP

Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung Satu Data Sumsel? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kualitas data sektoral, mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan selama proses pengelolaan data, serta menganalisis proses pengolahan dan perbaikan data dalam mendukung Satu Data Sumsel di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kondisi kualitas data sektoral dan proses pengelolaannya dalam mendukung Satu Data Sumsel di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan. Data penelitian bersumber dari kegiatan Magang Berdampak Satu Data Sumsel Batch 2 Tahun 2026 yang dilaksanakan pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan, khususnya pada Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP), pada 13 April 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.

Data yang dianalisis berupa data sektoral DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi target pengelolaan dalam kegiatan Satu Data Sumsel. Data diperoleh melalui proses pengumpulan dari unit terkait dan dokumentasi dataset yang tersedia selama kegiatan berlangsung. Selain dataset, informasi pendukung yang digunakan meliputi hasil pemeriksaan struktur dan format data, hasil *data cleaning*, standarisasi, metadata, serta dokumentasi proses input dan *quality control*.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan keterlibatan langsung. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi dataset dan proses pengelolaan data sektoral pada Tim Kerja PEP. Dokumentasi dilakukan terhadap dataset, metadata, hasil pengolahan, dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan data. Keterlibatan langsung dilakukan melalui proses pengumpulan, pemeriksaan, *data cleaning*, penyesuaian struktur, standarisasi, penyusunan dan validasi metadata, serta input dataset ke Portal Satu Data Sumsel.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengidentifikasi kondisi data pada tahap awal dan membandingkannya dengan kondisi setelah dilakukan pengolahan. Analisis difokuskan pada aspek ketersediaan data, kesesuaian struktur dan format, konsistensi informasi, kelengkapan metadata, dan kesiapan data untuk dipublikasikan. Aspek tersebut ditentukan berdasarkan permasalahan yang ditemukan selama proses pengelolaan data dan kebutuhan penyiapan dataset untuk publikasi melalui Portal Satu Data Sumsel.

Tahapan analisis dimulai dengan mengidentifikasi indikator data sektoral yang menjadi target pengelolaan. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diperiksa berdasarkan struktur dan formatnya. Data yang belum sesuai dilakukan *data cleaning* dan penyesuaian struktur. Salah satu bentuk penyesuaian dilakukan dengan mengubah tabel yang menggunakan *merged cells* menjadi struktur Flat Table dalam format CSV. Selanjutnya dilakukan standarisasi informasi dan kode wilayah agar data memiliki format yang seragam. Standarisasi kode wilayah dalam kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021.

Setelah proses pengolahan data, dilakukan penyusunan dan validasi metadata. Metadata digunakan untuk memberikan informasi yang menjelaskan dataset sehingga data dapat dipahami dan digunakan dengan konteks yang tepat. Dalam kegiatan ini terdapat 15 elemen atribut Metadata Statistik yang disiapkan dan divalidasi untuk dataset yang tersedia.

Dataset yang telah melalui *data cleaning*, standarisasi, dan validasi metadata kemudian diinput ke Portal Satu Data Sumsel berbasis CKAN. Setelah input dilakukan, *quality control* dilakukan untuk memastikan dataset dapat diakses dan tidak terdapat permasalahan seperti *broken link*. Berdasarkan hasil

kegiatan, 7 dataset beserta metadata berhasil diinput ke portal dan dilakukan pemeriksaan terhadap hasil publikasinya.

Seluruh hasil observasi, dokumentasi, dan keterlibatan langsung kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi kondisi kualitas data, permasalahan yang ditemukan, tindakan perbaikan yang dilakukan, dan hasil akhir penyiapan dataset. Dari 9 indikator data sektoral prioritas, sebanyak 7 indikator berhasil dikumpulkan dan diproses, sedangkan 2 indikator masih berstatus *pending*. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjelaskan kondisi kualitas data sektoral dan proses perbaikannya dalam mendukung Satu Data Sumsel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengelolaan data sektoral pada Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dalam rangka menyiapkan data untuk mendukung Satu Data Sumsel. Proses pengelolaan mencakup pengumpulan data, pemeriksaan, *data cleaning*, standarisasi, penyusunan dan validasi metadata, input dataset ke Portal Satu Data Sumsel berbasis CKAN, serta *quality control*. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses penyiapan data tidak berhenti pada ketersediaan dataset, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas untuk memastikan data siap digunakan dan dipublikasikan.

Kondisi Data Sektoral

Pada tahap awal dilakukan identifikasi terhadap data sektoral yang menjadi target pengelolaan. Terdapat 9 indikator data sektoral prioritas, dengan 7 indikator berhasil dikumpulkan dan diproses, sedangkan 2 indikator masih berstatus *pending*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan data masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesiapan data sektoral untuk masuk ke tahapan pengolahan dan publikasi.

Selain masalah ketersediaan, pemeriksaan awal menunjukkan adanya permasalahan pada struktur data. Data yang dikumpulkan masih ditemukan menggunakan struktur tabel konvensional dengan penggunaan *merged cells*. Struktur tersebut perlu disesuaikan sebelum data dapat digunakan dalam proses pengolahan dan integrasi ke sistem. Kondisi ini memperlihatkan bahwa data yang tersedia belum selalu berada dalam bentuk yang siap diproses.

Temuan tersebut sejalan dengan Raja dan Adlan (2022) yang menjelaskan bahwa pengelolaan data sektoral dalam Satu Data Indonesia menghadapi tantangan teknis karena data dapat disiapkan secara terdesentralisasi oleh masing-masing instansi. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan standar data, metadata, dan interoperabilitas membutuhkan proses koordinasi dan penyesuaian lebih lanjut.

Temuan pada DPMPTSP juga memiliki kesamaan dengan penelitian Syatria (2026) pada DLHP Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian tersebut menemukan bahwa implementasi tata kelola data sektoral telah mencakup pengumpulan, standarisasi, metadata, integrasi, dan penggunaan kode referensi, tetapi masih diperlukan peningkatan konsistensi metadata, keseragaman format data, serta koordinasi antarbidang.

Dengan demikian, kondisi pada DPMPTSP menunjukkan bahwa ketersediaan dataset belum secara otomatis menunjukkan kesiapan data. Dataset masih harus memenuhi kebutuhan struktur, format, standarisasi, dan informasi pendukung sebelum dapat digunakan dalam ekosistem Satu Data Sumsel.

Data Cleaning dan Standardisasi Data

Tahap berikutnya adalah *data cleaning* terhadap dataset yang belum memenuhi struktur yang diperlukan. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah penggunaan *merged cells* pada tabel. Struktur tersebut kemudian diubah menjadi Flat Table sehingga data dapat disimpan dalam format CSV dan lebih mudah diproses pada sistem.

Proses tersebut merupakan bentuk perbaikan kualitas data pada aspek struktur dan format. Data yang sebelumnya disusun untuk kebutuhan pembacaan manusia perlu disesuaikan agar dapat diproses sebagai dataset terstruktur. Dengan demikian, *data cleaning* tidak hanya berfungsi untuk menghilangkan kesalahan data, tetapi juga menyiapkan struktur data agar sesuai dengan kebutuhan pengolahan dan publikasi.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Habibie et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pengelolaan data pada platform *open government data* diperlukan untuk meningkatkan kualitas data yang dipublikasikan. Pengelolaan data menjadi bagian penting karena permasalahan kualitas dapat muncul sebelum data tersedia bagi pengguna.

Nugraha et al. (2024) juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas data pada lingkungan pemerintahan membutuhkan pengelolaan data secara sistematis. Dalam studi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, peningkatan kualitas data dikaitkan dengan aktivitas *Data Quality Management* dan tata kelola data.

Selain struktur data, dilakukan standardisasi informasi wilayah. Standardisasi kode wilayah digunakan untuk menyeragamkan informasi wilayah pada dataset. Dalam kegiatan ini, standardisasi mengacu pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.

Standardisasi tersebut penting karena perbedaan penulisan atau penggunaan kode dapat menghambat proses penggabungan dan pemanfaatan data. Hal ini sejalan dengan prinsip Satu Data Indonesia yang menempatkan standar data dan kode referensi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan tata kelola data. Raja dan Adlan (2022) juga menempatkan standar data dan kode referensi sebagai bagian dari prinsip yang diperlukan untuk mendukung integrasi data sektoral.

Penyusunan dan Validasi Metadata

Setelah data melalui proses *cleaning* dan standardisasi, dilakukan penyusunan dan validasi metadata. Metadata digunakan untuk memberikan informasi mengenai dataset sehingga pengguna dapat mengetahui konteks, karakteristik, serta informasi yang diperlukan untuk memahami data.

Dalam kegiatan ini terdapat 15 elemen atribut Metadata Statistik yang disiapkan dan divalidasi untuk dataset yang tersedia. Pada proses tersebut juga ditemukan beberapa indikator perizinan teknis yang belum memiliki definisi operasional dan konsep dasar yang memadai sehingga memerlukan pelengkapan informasi sebelum dipublikasikan.

Temuan tersebut relevan dengan penelitian Danu (2025) yang menunjukkan bahwa kualitas metadata merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di daerah. Penelitian tersebut menemukan bahwa metadata yang belum baku dan keterbatasan kapasitas pengelola dapat memengaruhi kualitas tata kelola data.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Raja dan Adlan (2022) yang menempatkan metadata sebagai salah satu prinsip utama dalam pengelolaan data sektoral. Metadata diperlukan agar data dapat ditemukan, dipahami, dan digunakan kembali dengan konteks yang tepat.

Selain itu, penelitian Muchidin (2024) mengenai pengelolaan metadata di lingkungan pemerintahan

menunjukkan bahwa metadata memiliki hubungan erat dengan penyediaan data yang akurat dan dapat digunakan.

Berdasarkan hasil tersebut, penyusunan metadata dalam kegiatan DPMPTSP tidak dapat dipandang sebagai kegiatan administratif semata. Metadata menjadi bagian dari proses penjaminan kualitas informasi dataset karena memberikan konteks yang diperlukan agar data dapat dipahami dan digunakan secara tepat.

Input Dataset dan Quality Control

Dataset yang telah melalui *data cleaning*, standardisasi, dan validasi metadata kemudian diinput ke Portal Satu Data Sumsel berbasis CKAN. Setelah proses input dilakukan, tahap berikutnya adalah *quality control* untuk memastikan dataset yang telah dipublikasikan dapat diakses dan tidak terdapat permasalahan seperti *broken link*.

Berdasarkan hasil kegiatan, 7 dataset beserta metadata berhasil diinput ke portal dan dilakukan pemeriksaan terhadap hasil publikasinya.

Tahapan ini menunjukkan bahwa publikasi dataset merupakan bagian akhir dari suatu rangkaian proses pengelolaan data, bukan proses yang berdiri sendiri. Data perlu diperiksa sebelum dan setelah dipublikasikan agar permasalahan yang muncul dapat diketahui dan diperbaiki.

Wahyuni et al. (2024) menjelaskan bahwa interoperabilitas merupakan aspek penting dalam mendukung pertukaran data antar sistem pemerintahan. Standardisasi data diperlukan agar sistem dapat berkomunikasi dan data dapat digunakan secara lebih efektif.

Dalam konteks DPMPTSP, proses *quality control* setelah input menjadi penting karena dataset tidak hanya harus tersedia di portal, tetapi juga harus dapat diakses dengan baik. Hal tersebut mendukung tujuan Satu Data Sumsel sebagai sarana integrasi dan penyebarluasan data pemerintah daerah.

Analisis Kualitas Data Sektoral

Berdasarkan keseluruhan tahapan, kualitas data sektoral pada kegiatan ini dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu ketersediaan data, kesesuaian struktur dan format, konsistensi, kelengkapan metadata, dan kesiapan publikasi.

Tabel 1. Hasil Analisis Kualitas Data Sektoral pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

Aspek kualitas	Temuan	Tindakan
Ketersediaan data	9 indikator menjadi target; 7 diproses dan 2 <i>pending</i>	Pengumpulan dan tindak lanjut data
Struktur dan format	Ditemukan tabel dengan <i>merged cells</i>	<i>Data cleaning</i> dan transformasi ke <i>Flat Table CSV</i>
Konsistensi	Diperlukan standardisasi informasi/kode wilayah	Standardisasi kode wilayah
Metadata	15 elemen metadata disiapkan dan divalidasi	Penyusunan dan validasi metadata
Kesiapan publikasi	Dataset perlu diperiksa setelah input	<i>Quality control</i> pada Portal Satu Data Sumsel

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas data sektoral pada DPMPTSP tidak hanya ditentukan oleh apakah data tersedia, tetapi juga oleh bagaimana data tersebut disusun, distandarkan, dideskripsikan, dan disiapkan untuk dibagikan. Temuan ini sejalan dengan Cahyaningsih et al. (2025) yang

menunjukkan pentingnya pengelolaan kualitas data dalam lingkungan pemerintahan karena kualitas data berpengaruh terhadap kemampuan organisasi menghasilkan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan.

Kurniawati et al. (2025) juga menekankan bahwa kualitas data perlu diperhatikan sepanjang siklus *interagency data sharing*. Hal tersebut relevan dengan proses yang dilakukan pada DPMPTSP karena data sektoral dipersiapkan untuk dibagikan melalui ekosistem Satu Data Sumsel.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Syatria (2026) pada perangkat daerah lain di Sumatera Selatan. Walaupun objek penelitian berbeda, kedua kegiatan menunjukkan pola permasalahan yang serupa, yaitu perlunya standarisasi format, pengelolaan metadata, dan koordinasi dalam penyiapan data sektoral. Perbedaannya, penelitian ini secara khusus menganalisis kualitas data sektoral DPMPTSP dan tahapan perbaikan data sebelum publikasi pada Portal Satu Data Sumsel.

Secara keseluruhan, proses pengelolaan menghasilkan 7 dataset yang berhasil diproses dan dipublikasikan, sedangkan 2 indikator masih memerlukan tindak lanjut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan proses *data cleaning*, standarisasi, metadata, dan *quality control* dapat membantu menyiapkan dataset agar lebih sesuai untuk digunakan dalam penyelenggaraan Satu Data Sumsel. Namun, proses tersebut juga menunjukkan perlunya standarisasi sejak tahap awal pengumpulan data agar kebutuhan perbaikan pada tahap akhir dapat diminimalkan.

KESIMPULAN

Pengelolaan data sektoral pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa kesiapan data untuk mendukung Satu Data Sumsel tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dataset, tetapi juga oleh kualitas struktur, konsistensi, kelengkapan metadata, dan kesiapan data untuk dipublikasikan. Proses pengelolaan yang dilakukan menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian terhadap data sebelum dapat digunakan dalam ekosistem Satu Data Sumsel, terutama melalui perbaikan struktur data, standarisasi, penyediaan metadata, dan pemeriksaan hasil publikasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa proses penyiapan data sektoral mampu menghasilkan dataset yang lebih terstruktur dan siap dipublikasikan melalui Portal Satu Data Sumsel. Namun, masih terdapat data yang membutuhkan tindak lanjut sehingga pengelolaan kualitas data perlu dilakukan secara berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan pentingnya penerapan standar data dan metadata sejak tahap awal pengumpulan serta koordinasi antara pengelola dan penyedia data agar proses penyiapan dan publikasi data dapat berlangsung lebih konsisten.

Dengan demikian, peningkatan kualitas data sektoral di DPMPTSP perlu diarahkan pada standarisasi sejak tahap awal, penguatan kelengkapan metadata, serta validasi sebelum dan setelah publikasi. Upaya tersebut dapat membantu menghasilkan data sektoral yang lebih siap digunakan dan dibagikan dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Sumsel.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernot, A., Tjondronegoro, D., Rifai, B., Hasan, R., Liew, A. W. C., Verhelst, T., & Tiwari, M. (2024). Institutional Dimensions in Open Government Data: A Deep Dive Into Indonesia's Satu Data Initiative and Its Implications for Developing Countries. *Public Performance and Management Review*, 47(6), 1399–1429. <https://doi.org/10.1080/15309576.2024.2377609>

- Cahyaningsih, E., Rinjatmoko, A., & Sari, W. P. (2025). Pengukuran Kualitas Data Menggunakan Framework Total Data Quality Management: Studi Kasus Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rutan Klas I Jakarta Pusat. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 12(1), 121–132. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2025129178>
- Danu, I. A. (2025). Strategi Kebijakan Penguatan Kualitas Metadata Dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Statistik Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 20(2), 125–138. <https://doi.org/10.47441/jkp.v20i2.452>
- Habibie, K., Suhardi, S., & Muhamad, W. (2023). Implementation of Data Governance on the Open Government Data Management Platform to Improve Data Quality. *IJAIT (International Journal of Applied Information Technology)*, 7(02), 92. <https://doi.org/10.25124/ijait.v7i02.5979>
- Irawan, S., & Handayani, R. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.225>
- Kurniawati, M. V., Zulmy, M. F., & Ruldeviyani, Y. (2025). The Optimizing Data Quality in Interagency Data Sharing: A Framework. *Jurnal Ilmu Komputer dan Informasi*, 18(1), 47–66. <https://doi.org/10.21609/jiki.v18i1.1310>
- Maulidya, R., & Rozikin, M. (2022). Analisis Retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 273. <https://doi.org/10.25157/dak.v9i2.7884>
- Muchidin, A. N. S. (2024). PENGELOLAAN METADATA DI PEMERINTAHAN: PENTINGNYA KUALITAS DATA DALAM MENYEDIAKAN DATA YANG AKURAT, STUDI KASUS DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI. *INFOTECH journal*, 10(2), 265–269. <https://doi.org/10.31949/infotech.v10i2.11095>
- Nugraha, T. F., Wibowo, W. S., Genia, V., Fadhil, A., & Ruldeviyani, Y. (2024). A Practical Approach to Enhance Data Quality Management in Government: Case Study of Indonesian Customs and Excise Office. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, 10(1), 51–69. <https://doi.org/10.20473/jisebi.10.1.51-69>
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2026). *Profil Satu Data Sumsel*. <https://satudata.sumselprov.go.id/index.php/tentang/profil>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019>
- Raja, H. S., & Adlan, C. A. (2022). Satu Data Indonesia in Sectoral Statistics: Concept of Satu Data Metadata Framework (SDMF). *Proceedings of The International Conference on Data Science and Official Statistics*, 2021(1), 315–325. <https://doi.org/10.34123/icdsos.v2021i1.243>
- Syatria, R. (2026). Implementasi Tata Kelola Data Sektoral Mendukung Satu Data Indonesia di DLHP Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 9294–9306. <https://doi.org/10.63822/jenhd578>
- Wahyuni, H., Mutiarin, D., Pribadi, U., Kumorotomo, W., & Arie Saputra, H. (2024). Optimizing Data Interoperability for System Efficiency: One Data Standard in the Government Environment. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 15(3), 313–339. <https://doi.org/10.18196/jsp.v15i3.379>
- Zannuba, L. A., Satyawan, D. S., & Wijaya, S. S. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA PADA TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS. *PUBLIC POLICY AND MANAGEMENT INQUIRY*, 8(1), 38–58. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2024.8.1.11939>